Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

Settlement of Joint Property Disputes after Divorce in Positive Law in Indonesia

Elfirda Ade Putri¹⁾* & Windy Sri Wahyuni²⁾

1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: Elfirdade.putri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. Masalah difokuskan pada pembagian harta bersama setelah perceraian anatar suami istri. Guna mendekati masalah ini dipergunakan teori perlindungan hukum dan metode penelitian hukum normatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa harta bersama setelah perceraian biasanya dibagi rata (50%) antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959. Sementara itu, harta yang diwarisi dan diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan, menjadi milik pribadi mereka sendiri.

Kata Kunci: Sengketa; Harta Bersama; Perceraian.

Abstract

This article aims to find out and discuss the settlement of joint property disputes after divorce in positive law in Indonesia. The problem is focused on the distribution of joint property after divorce between husband and wife. To approach this problem, legal protection theory and normative legal research methods are used. The data were collected through literature study and applicable laws and regulations and analyzed qualitatively. This study concludes that joint property after divorce is usually divided equally (50%) between husband and wife. This is based on the provisions of Article 128 of the Civil Code, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and in line with the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 424.K/Sip.1959. Meanwhile, the assets inherited and obtained by each party before the marriage took place became their own private property.

Keywords: Dispute; Joint Assets; Divorce.

How to Cite: Putri, E.A. & Wahyuni, W.S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14 (2): 94-106.

PENDAHULUAN

KUHPerdata (BW), mengatur tentang harta bersama dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga macam, yakni harta bersama menurut Undang-undang (Pasal 119-123); pengurusan harta bersama (Pasal 124-125); dan pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138) (Hadikusuma, 2003). Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan). Termuat dalam Bab VII yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama; sedangkan pada ayat (2) dijelaskan tentang harta bawaan; harta benda yang didapat sebelum perkawinan serta harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan tetap berada di tangan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Pasal 36 ayat (1) berisi tentang harta bersama dapat digunakan dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan di ayat (2) diatur tentang para pihak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Dalam Pasal 37 diatur tentang jika terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing para pihak.

Undang-undang Perkawinan hanya mengatur persoalan-persoalan yang pokok, sedangkan penjabarannya didasarkan atas peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Adapun asas penting dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada pengecualian dalam penerapan hukum harta perkawinan untuk kelompok tertentu. (Pasal 37)
2. Asas monogami relatif (Pasal 3 ayat 1).
3. Persamaan hak suami istri (Pasal 31 ayat 1).

4. Kecakapan istri untuk bertindak selama perkawinan (Pasal 31 ayat 2).
5. Harta bersama dibagi kepada suami istri, kecuali harta bawaan (Pasal 35 ayat 1).
6. Harta yang termasuk dalam harta bersama adalah harta asli dan harta yang diperoleh seperti wakaf atau warisan dimiliki oleh masing-masing pihak (Pasal 35 ayat 2).
7. Kemungkinan penyimpangan dalam bentuk perkawinan harta benda dan selama perkawinan, selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, akad perkawinan dapat diubah.
8. Tindakan hukum terhadap harta bersama harus dengan kesepakatan atau persetujuan suami istri. (Pasal 36 ayat 1)
9. Sehubungan dengan harta warisan masing-masing pihak, suami istri memiliki hak penuh. (Kadir, 1994)

Dalam hal perceraian, perlu ditegaskan secara jelas apa saja yang menjadi hak istri dan hak suami. Masalah harta bersama sering muncul antara mantan suami istri, dan bahkan perselisihan harta bersama sering mengikutsertakan keluarga besar kedua belah pihak. Pasal 126 KUH Perdata berisi tentang perceraian berakibat pada terpisahnya harta bersama sehingga harus dibagi antara suami istri. Selain pengertian harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang konsep harta bersama. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Djais, 2003)

Akibat hukum atau akibat perceraian atas seluruh harta benda diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan.

Harta perkawinan dibagi menjadi harta bersama dan harta bawaan atau asli, hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan.

Semua harta kekayaan yang diperoleh selama perjanjian perkawinan berada di luar lingkup pemberian warisan. Oleh karena itu, harta kekayaan yang didapatkan suami atau istri melalui usahanya adalah milik bersama. Berbeda halnya dengan harta yang diperoleh pasangan sebelum pernikahan, yaitu harta asal atau harta warisan, dan jika pasangan itu meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka harta itu diwarisi oleh semua keluarga. Definisi harta bersama yaitu harta yang diterima bersama oleh suami selama perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa (Manan, 1993). Harta bersama dan perjanjian pranikah sering kali luput dari perhatian publik karena mereka sering melihat pernikahan sebagai tujuan suci.

Hilman Hadikusuma menerangkan akibat hukum yang timbul berkaitan dengan harta bersama berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum apa dan hukum mana yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, hakim dapat memberikan pertimbangan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Oleh karena itu, dampak perceraian terhadap harta bersama dapat bervariasi dari individu ke individu, tergantung pada hukum mana yang digunakan untuk mengatur harta bersama.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama bagi orang Islam diatur dalam KHI. Pasal 97 KHI berisi tentang harta bersama dibagi dua kepada suami dan istri jika terjadi perceraian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI menyatakan tentang jika terjadi putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian, maka suami istri

mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 (Hadikusuma, 2003) tanggal 9 Desember 1959 yang berisi tentang apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama. Fenomena yang berkaitan dengan pembagian harta bersama di Indonesia, seperti contoh peristiwa tragis yang terjadi pada pasangan yang memperebutkan harta dalam proses perceraian. Tempat suami (Irfan TNI AL) membunuh istrinya (Eka Suharti). Di sini, A Hakim Taufiq memutuskan dalam persidangan di Inkuisisi Sidoarjo bahwa harta itu dibagi dua sehubungan dengan pembagian harta gonogini antara Irfan dan Eka. Namun, Kolonel Irfan tidak senang dengan hasil keputusan tersebut (Andayani, 2005). Masih banyak fenomena yang terjadi, seperti fenomena berbagi harta bersama berdasarkan besarnya iuran perkawinan yang terlihat dalam kehidupan di Desa Muraran Jongbang. Suaminya, Budi, bekerja sebagai pedagang tahu keliling. Budi dan Anna terus bertengkar selama pernikahan mereka sampai pernikahan mereka berusia dua tahun dan memiliki anak, tetapi para wanita menganggap mereka tidak dapat menopang pekerjaan rumah tangga.

Kontroversi antara Budi dan Anna muncul dari perasaan ketidaktahuan akan situasi ekonomi, dan akhirnya mereka bercerai ketika Inkuisisi John Bang menyetujui perceraian Anna dari Sang Buddha. Beberapa bulan setelah perceraian, Budi tiba-tiba merobohkan rumah yang dibangun Anna. Menurut Budi, rumah itu dibangun sebagai hasil usahanya sebelumnya untuk bekerja dan berkumpul dari pagi sampai malam, sehingga Budi sepihak selama perkawinan tanpa izin dan konsultasi peralatan di desa setempat. pihak-pihak yang terlibat (Ismihayati, 2010). Banyaknya perceraian

yang mengabaikan anak dan semakin banyak anak yang menjadi pengamen jalanan jika harta bendanya, dampaknya bagi anaknya, atau jika ia sangat membutuhkan peran orang tua dan nama untuk mencari nafkah, berujung pada mengemis dan melakukan pencurian. Ini adalah tugas dan kewajiban orang tua untuk membesarkan, merawat, dan mencintai anak-anaknya, dan adalah tugas negara untuk melindungi semua warga negara.

Dari uraian pembagian harta bersama di atas dan salinan putusan yang diterima oleh penulis, penulis mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak ketika suami mengambil tindakan hukum dengan meminjamkannya. Menurut tergugat, uang ke bank Danamon, yang merupakan harta bawaan penggugat dan memiliki milik bersama yang dijamin dijual kepada pihak ketiga, dan uang dari pinjaman penggugat dapat digunakan oleh penggugat untuk menikah kembali ditemukan. Membiayai nafkah istri baru tanpa sepengetahuan tergugat, sehingga banyak pasangan yang belum mengetahui apa yang membedakan secara jelas antara harta warisan dan harta bersama. Ketika membagi harta bersama, hal ini sering menjadi kontroversi yang berlarut-larut dan harus diputuskan oleh pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi (Soekanto, 1986). Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-perundangan. Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual yaitu memaparkan teori hukum dan menginterpretasikan hukum yang berlaku, menganalisa perbandingan

hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang seharusnya, serta konsistensi hukum. Bahan-bahan yang dikumpulkan akan diinterpretasikan dalam pengertian interpretasi hukum. Penafsiran tersebut adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsir harus berusaha mengungkap Kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan-bahan hukum yang diperoleh merupakan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik secara deduktif, dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan antara seorang pria dan wanita, maka berubahlah statusnya menjadi suami istri, dengan berubahnya status tersebut membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 (Syawali, 2009). Ketentuan Pasal 30 menyebutkan: "Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dengan demikian keluarga adalah lingkungan masyarakat terkecil, oleh karena itu suami istri tidak dapat menghindari untuk melaksanakan kewajiban dalam membina rumah tangga, suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan bermasyarakat mempunyai hak dan dalam kedudukan yang sama, sekalipun dilakukan tindakan hukum, baik suami maupun istri dapat melakukannya dengan bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Laki-laki dan perempuan memiliki hak

dan kewajiban yang sama, tetapi untuk kepala keluarga, tetap berada pada pihak suami dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan tentang:

1. Persamaan Hak dan kewajiban suami dan istri.
2. Persamaan hak dalam melakukan perbuatan hukum bagi suami istri.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasangan itu harus memiliki tempat tinggal tetap untuk hidup bersama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Masalah tersebut diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Perkawinan, yang berisi tentang:

1. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap.
2. Rumah tempat tinggal ditentukan oleh suami istri.

Untuk membangun keluarga dalam kehidupan dan antara pria dan wanita, kita perlu saling setia, mencintai, menghormati, dan mendukung secara fisik dan mental. Laki-laki, kekuatan fisiknya yang dari istrinya tidak perlu dikatakan bahwa harus melindungi istri dan memenuhi semua kebutuhan untuk kesejahteraan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Syawali, 2009). Di sisi lain, istri berkewajiban menguasai segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-undang Perkawinan.

Ada hal lain yang tidak kalah pentingnya selain hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, yaitu berkaitan dengan harta keluarga yang diperoleh selama perkawinan. Undang-undang Perkawinan, menyebutkan 3 (tiga) macam harta, yaitu harta bawaan, harta bersama dan harta yang diberikan atau diwarisi oleh setiap orang selama perkawinan. Pembagian harta bersama seringkali menjadi isu penting dalam proses perceraian, dan bahkan dalam beberapa kasus, sengketa harta

bersama memperlambat dan justru memperumit proses perceraian, dengan kesalahpahaman publik menimbulkan sengketa harta bersama.

Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH., dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa (Kadir, 1994) "Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur".

Menurut Drs. Abdul Manan, SH., SIP., M. Hum. (Manan, 1997) bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Jenis kepemilikan bersama terdiri dari empat sumber yaitu :

1. Harta hibah dan warisan dari salah satu pasangan.
2. Aset dari usaha masing-masing pihak sebelum pernikahan.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan atau akibat perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus sebagai warisan salah satu pasangan.

Menurut Ismail Muhammad Syah "keempat macam sumber ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan istri (Syah, 1984). Keempat harta yang diperoleh tersebut disebut harta kekayaan. Konsep harta dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan mengenal dua macam harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta milik pribadi (Manan, 1994). Yang termasuk harta milik pribadi dari masing-masing antara suami istri adalah:

1. Harta yang dibawa setiap orang dalam perkawinan, termasuk utang-utang yang belum dibayar;
2. Aset yang dibeli sebagai hadiah, kecuali dinyatakan lain;
3. Warisan yang diperoleh pasangan suami istri, kecuali dinyatakan lain;
4. Hasil harta pribadi selama perkawinan (termasuk hutang yang timbul dalam pengurusan harta pribadi).

Yang termasuk dalam harta bersama:

1. Harta yang didapatkan selama perkawinan;
2. Harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan jika ditentukan demikian;
3. Termasuk dalam hal ini utang yang timbul selama perkawinan, kecuali utang pribadi masing-masing suami istri.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersimpul bahwa pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami maupun istri telah memperoleh persetujuan dari istri atau suami dengan dilangsungkannya perkawinan itu, namun untuk perbuatan-perbuatan hukum yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta benda tersebut pada pihak ketiga harus memperoleh persetujuan dari suami dan apabila suami yang melakukan perbuatan hukum, harus mendapat persetujuan istrinya. Untuk setiap harta yang diwarisi, suami dan istri berhak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap harta benda mereka, dengan demikian tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain suami istri itu apabila ia akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya, tidak sebagaimana halnya harta bersama dimana istri harus mendapat persetujuan suaminya dan sebaliknya suami harus mendapat persetujuan dari pihak istrinya. Harta bendanya yang dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (2) itu tidak saja harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan (Mulati, 2003). Untuk utang pasangan yang sudah menikah, pasangan itu bertanggung jawab dengan harta bersama mereka. Apabila utang tersebut adalah utang suami, maka suami

yang bertanggung jawab atas warisan dan harta bersamanya. Harta bawaan istri tidak bertanggung jawab atas utang suaminya. Dalam hal utang pasangan setelah perceraian, pasangan bertanggung jawab atas harta benda mereka (Syawali, 2009). Dan dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian, keadaan harta benda pasangan itu akan dipisahkan atau dibagi dan hal ini juga diatur dalam Pasal 1, 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan, dan dapat dipahami bahwa hadiah atau warisan dalam perkawinan adalah milik dan dikuasai oleh suami atau istri.

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menjelaskan pengaturan lebih lanjut mengenai harta bersama apabila putusnya perkawinan akibat perceraian agar diatur menurut hukum yang ada sebelum atau pada saat peristiwa itu terjadi yang berlaku terhadap suami istri tersebut, oleh karena Undang-undang Perkawinan itu sendiri tidak mengaturnya. Atas dasar ketentuan Pasal 37 itu, maka suami istri yang tunduk kepada KUHPerdara, harta bersama mereka itu diatur menurut KUHPerdara, apabila perkawinan mereka putus akibat perceraian; jika mereka tunduk pada Hukum Islam, maka harta bersama mereka akan diatur berdasarkan hukum Islam, dan mereka yang tunduk pada hukum Adat, apabila terjadi perceraian, harta bersama diatur berdasarkan hukum adat, dan atau peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku saat peristiwa itu terjadi. Undang-undang tidak mengatur dan menyinggung tentang harta bersama jika putusnya perkawinan akibat kematian salah satu pihak dari suami istri, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan diperlakukan ketentuan yang ada dan berlaku bagi mereka itu, yang dimaksud dengan ketentuan yang ada dan berlaku bagi mereka itu ialah ketentuan hukum yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan dan atau yang ada kemudian yang berlaku bagi mereka yang sedang bercerai. Mengenai harta milik pribadi suami istri tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan jika perkawinan putus, baik putusnya perkawinan itu karena

kematian maupun karena perceraian (Syawali, 2009). Sehubungan dengan aturan hukum Islam berdasarkan Undang-undang Perkawinan, jika terjadi perceraian yang perceraianya atas kehendak suami, maka suami harus memberikan hadiah kepada istrinya yang akan diceraikannya (djais, 2003). Tindakan suami dan istri yang berkaitan dengan harta bersama harus didasarkan atas kesepakatan bersama karena tanpa adanya kesepakatan bersama memungkinkan adanya kerugian salah satu pihak (Supramono, 1989). Perjanjian ini membantu untuk menghindari kesenjangan antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Selanjutnya berlaku Hukum Pembagian Harta Bersama, dan tata cara pembagiannya diatur dalam Pasal 35 (1) Undang-undang Perkawinan. Harta yang didapatkan selama perkawinan secara otomatis akan menjadi harta bersama, dan jika diceraikan, akan dibagi dua dan pasangan akan menerima 50% dari harta tersebut (Ali, 2008). Prinsip atau pendelegasian keadilan dan transparansi sangat penting dalam pembagian harta bersama ini. Karena hal ini hanya dapat dibuktikan oleh hukum positif. Namun perlu disadarkan suami istri agar hak dan kezaliman mereka tidak dilanggar dan hak dan harta orang lain tidak dikelola secara bathil. Menurut Undang-undang Perkawinan, Pasal 35, jelas mengatur bahwa harta perkawinan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, barang umum, yaitu barang yang diperoleh sejak perkawinan dan yang tetap berlaku selama suami istri terikat oleh ikatan perkawinan, harta ini sering disebut dengan istilah "harta gono gini", istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gono artinya suami dan gini artinya istri. Harta Gono Gini adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, dan jika terjadi perceraian di kemudian hari, harta itu dibagi 50% dari setiap orang, karena harta ini milik bersama. Kecuali ada perjanjian yang bertentangan sebelum atau sesudah perkawinan atau kekayaan karena kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.

Harta perkawinan tidak hanya disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi juga dijelaskan dalam

Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan keputusan atau wewenang utama dari pengadilan agama, yang telah dianut oleh para sarjana dan sarjana hukum Islam di seluruh Indonesia dalam seminar-seminar yang telah diselenggarakan dan diidentifikasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan bagi mereka yang membutuhkannya untuk menyelesaikan sengketa di tiga bidang hukum tersebut di atas. Sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai harta bersama menurut Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam berisi tentang Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam ini dijelaskan tentang adanya harta bersama dalam perkawinan yaitu pada buku I Pasal 85 sampai Pasal 97, dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang adanya harta kekayaan kawin, akan tetapi menutup kemungkinan untuk adanya harta masing-masing baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Menurut Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang:

1. Tidak ada percampuran harta suami istri karena perkawinan.
2. Harta istri dan suami tetap dikuasai masing-masing pihak.

Kemudian Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang Harta bawaan suami dan istri di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, shodaqoh atau lainnya.

Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta

bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat yang berisi tentang jenis harta bersama. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari empat ayat yaitu:

1. utang suami istri dibebankan pada hartanya masing-masing
2. utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
3. Jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri dari dua ayat yang berisi tentang:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari dua ayat yang berisi tentang:

1. Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta permohonan gugatan cerai, jika salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
2. Selama masa Sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat yang berisi tentang:

1. Jika terjadi cerai mati, maka separuh $\frac{1}{2}$ harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan.

Dan terakhir Pasal 97 mengatur bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam diatas dipahami bahwa Hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut.

Untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 Undang-undang Perkawinan tersebut diatas, akan dikemukakan uraian dari M. Yahya Harahap (Ansyari, 2010) sebagai berikut:

1. Harta yang diberi selama perkawinan tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk harta bersama, hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971.
2. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama, misalnya selama masa perkawinan suami istri itu mempunyai uang tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian diantara mereka. Dalam hal ini hukum tetap dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama setelah terjadinya perceraian.

3. Harta yang diperoleh selama perkawinan, semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan.
4. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing.
5. Segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan.

Selanjutnya menurut Anshary MK, ruang lingkup harta bersama meliputi "Harta kekayaan dalam bentuk benda berwujud dan tidak berwujud, aktiva dan pasiva yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut apabila dilakukan transaksi harus ada persetujuan bersama suami istri.

Menurut H. A. Mukti Arto, ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau istri.
4. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami istri.
5. Segala penghasilan pribadi suami.
6. Segala penghasilan pribadi istri dan,
7. Segala penghasilan harta bersama suami istri.

Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami istri, kecuali dibuktikan sebaliknya, taspen dan asuransi termasuk harta bersama. Dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku, maka segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada penerapannya, tidak demikian sederhana. Berbagai unsur terkait yang menyebabkan menjadi rumit. Hal inilah dibutuhkan analisa dan keterampilan yang memadai pada proses penyelesaiannya. Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh kemungkinan adanya harta milik masing-

masing. Secara lebih luas, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menegaskan ruang lingkup harta bersama meliputi:

1. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Menurut Sayuti Thalib "Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka, karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Selanjutnya Soemiyati berpendapat jika dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Dari pernyataan di atas, konsep kepemilikan bersama dalam syariat Islam adalah harta benda yang diterima oleh pasangan suami istri selama perkawinan, dan harta suami atau istri yang ada sebelum perkawinan, seperti hadiah, warisan, subsidi atau harta lainnya, dan pada saat perkawinan, semua harta ini adalah Jika itu tetap menjadi milik seseorang, harta itu tetap sepenuhnya

milik semua orang dan memiliki kendali penuh atas harta itu. Al-Quran maupun Hadist tidak membicarakan tentang Harta bersama, akan tetapi dalam kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama yang disebut Syirkah atau Syarikah.

Dalam Al-Quran yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama yaitu Surat Annisa ayat 32 yang artinya berbunyi (Damanhuri, 2010) "Janganlah kamu iri hati karena Allah melebihkan setengah kamu dari pada yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya. Menurut ayat itu, dalam perkawinan boleh ada warisan dari istri yang terpisah dari harta suami, dengan masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki sendiri. Di sisi lain, tidak ada harta bersama (properti pencarian) dari pasangan.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas, sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Quran, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya, pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraoef serta diikuti oleh murid-muridnya, sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukmnya, tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka ketentuan itu pasti dalam Al-Hadist dan Al-Hadist ini merupakan sumber hukum Islam juga (Jafisjam, 1977). Pendapat terakhir tersebut diatas adalah sejalan dengan pendapat sebagian ahli hukum Islam. Di dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah,

Kalangan mazhab Syafi'i terdapat 4 (empat) macam yang disebutkan harta Syarikat (disebut juga Syarikat, Syarkat, dan Syirkat), yaitu (1) Syarikat *I'nan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; (2) Syarikat *Abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya; (3) Syarikat *Mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; (4) Syarikat *Wujuh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

Terhadap pembagian harta Syarikat seperti yang telah dikemukakan dibagi 4 (empat) macam dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Syafi'i, tetapi dalam praktik peradilan mereka hanya mengakui Syarikat *i'nan* saja, Para pakar hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi dan Maliki dapat menerima syarikat ini karena syarikat tersebut merupakan muamalah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka mempertahankan hidupnya, Syarikat ini dapat dilaksanakan asalkan tidak dengan paksaan, dan dilaksanakan dengan itikad yang baik. Jika salah satu pihak merasa tidak cocok lagi melaksanakan perkongsian yang disepakati, maka ia dapat membubarkan perkongsian itu secara baik dan terhadap hal ini tidak dapat diwariskan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri

mestinya masuk dalam *Rub'u Mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi dibicarakan tentang pengkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan *Syarikat* atau *Syirkah*. Masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *Syirkah* maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab Fikih, harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *Syarikat abdan* dan *mufawadliah* sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum Fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, dalam kitab-kitab Fikih disebutkan garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya. Namun demikian, para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *Syarikat Abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri dalam Kompilasi. Para perumusan Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *Syarikat Abdan* dengan Hukum Adat, cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi *urf* sebagai sumber hukum dan sejai dengan kaidah yang mengajarkan "*al'adatu muhakkamah*".

Pembagian Harta Bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan diekemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIF/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri mendapat setengah bagian. Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah di Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (Manan, 2009).

Kewenangan suami istri atas harta bersama diatur di dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang suami istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami memerlukan persetujuan istri dan sebaliknya istri memerlukan persetujuan suami, jika salah satu dari suami istri melakukan pengalihan harta bersama, seperti dengan menjual, menggadai, menghipotikkan, menghibahkan, dan tindakan hukum yang lain. Hal ini berarti suami istri berwenang melakukan tindakan hukum atas harta bersama sepanjang ada persetujuan dari kedua belah pihak. Mengenai persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang termuat

dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

J. Satrio, menyatakan secara gramatikal dapat diartikan bahwa suami ataupun istri harus bertindak bersama-sama, suami memberikan kuasa/persetujuannya kepada istri dan sebaliknya. Secara teori pemberlakuan prinsip tersebut kaku dan dapat menimbulkan keruwetan dan kesulitan baik bagi suami maupun istri dalam bertindak terhadap harta bersama, terutama menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari (Satrio, 1991). Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewenangan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari tersebut, memberikan konsekuensi terhadap penggunaan harta bersama seorang istri yang akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mungkin menunggu suami pulang dari kantor lalu meminta persetujuannya untuk berbelanja keperluan harian. Dalam hal seperti ini, hukum mengenai adanya teori *Factie* yakni seorang suami dianggap telah memberikan persetujuannya kepada istri dan sebaliknya istri memberikan persetujuan kepada suami dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama menyangkut kepengurusan rumah tangga sehari-hari, berdasarkan kewenangan masing-masing, kemudian, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri, walaupun sepanjang perkawinan penghasilan lebih banyak dihasilkan dari jerih payah suami atau istri.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sebaliknya kewenangan dari suami istri terhadap harta bersama itu dapat dibatasi seperti larangan untuk menjual atau tindakan hukum lainnya, jika merugikan dan membahayakan

kepentingan masing-masing pihak maupun terhadap harta bersama itu sendiri. Pembatasan kewenangan suami istri terhadap pengelolaan dan pengurusan harta bersama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) itu dapat dilakukan dengan berdiri sendiri tanpa didahului dengan permohonan cerai talak atau gugatan cerai, apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka suami atau istri dapat menjual harta bersama untuk keperluan tertentu setelah mendapat izin Pengadilan Agama yang berwenang. Baik Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah meletakkan dasar-dasar hukum perkawinan yang lebih substansif dibandingkan pandangan fikih dalam menilai hubungan suami dan istri. Paradigma perkawinan yang dibangun oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada penyamaan kedudukan suami dan istri, yang membedakannya hanyalah perbedaan peran suami dan istri di dalam lembaga keluarga. Paradigma tersebut jelas dapat dipahami pada Pasal 32 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan bunyi Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Menelaah dasar-dasar perkawinan dan hukum Islam yang diundangkan oleh Undang-undang Perkawinan mengungkapkan dampaknya terhadap pembentukan nilai-nilai dasar hukum yang terkait dengan harta bersama. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip dari Hukum Harta Benda Bersama, yaitu:

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1F).
2. Sebagai aturan umum, tidak ada campuran harta suami dan istri karena perkawinan.
3. Harta bawaan di bawah kendali masing-masing individu kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian pranikah.

Mencermati pasal dalam Undang-undang Perkawinan, terdapat nilai hukum baru yang terangkum dalam kompilasi hukum Islam, yaitu harta bersama pasangan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan perolehannya diduga atas nama siapa pun. tanpa mempersoalkan siapa yang mencari, apabila dalam kasus perceraian maka setengah (sama) hak untuk keduanya.

SIMPULAN

Pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Jika perkawinan putus karena kematian atau perceraian, masing-masing pasangan akan menerima setengah dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Bagi para pihak, terutama suami istri, perceraian jangan sampai terjadi dalam perkawinan. Karena memiliki akibat hukum baik pembagian harta maupun hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. *Jurnal Perspektif*. 10 (4): 351.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djais, M. (2003). *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Semarang: Univ Diponegoro.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Husni, S. (2009). *Pengurusan Bestuur Atas Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismiyati, N. (2010). *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kansil, CST. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khosyi'ah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, *Al Manahij*, XI (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad, A. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya,
- Rasyid, A. *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Zahrah, M.A. (2007). *Alih Bahasa Saefullah Usul Fikh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Zulfiani. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. II (2).